



Penguatan Pasar Hijau Lokal dengan Menghubungkan Pengadaan dengan Perusahaan Berkelanjutan

Naskah Lanskap Kebijakan | Indonesia
Pembuatan Prototipe Kebijakan Lab Praktisi SEED



Imprint

Publisher: SEED
c/o adelphi research gGmbH
Alt Moabit 91, 10559 Berlin, Germany
www.seed.uno | info@seed.uno

This publication by SEED / adelphi research gGmbH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Suggested citation: SEED (2021). Strengthening Local Green Markets by Linking Procurement with Sustainable Enterprises. Policy Landscape Paper. Berlin, Germany.

Authors: Andres Olarte Pena, Camilla Shearman, Derisko Malayu Putra, Gita Syahrani, Ivy Londa, Ristika Putri

Graphics: John Chandratat, Tania, Islam

Contact us: labs-policy-prototyping@seed.uno



DAFTAR ISI

- Ringkasan Laporan 1
- Pendahuluan 2
- 1. Penyelarasan komitmen global dengan dampak lokal 3
- 2. Peran UMKM Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal 5
- 3. Tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia untuk mencapai skala..... 10
- 4. Kerangka Kebijakan untuk Mempromosikan UMKM di Indonesia 11
- Pelaku Ekosistem 12
- Langkah Selanjutnya: Lab Kebijakan untuk Pengadaan Berkelanjutan 13
- Referensi 14

RINGKASAN LAPORAN

Selama satu setengah tahun terakhir, pandemi Covid-19 dan guncangan sosial dan ekonomi terkait telah menggarisbawahi pentingnya ekonomi lokal yang kuat. Ketika rantai nilai global dan regional terganggu, bisnis lokal dan rantai nilainya muncul sebagai penyedia penting barang dan jasa penting, terutama bagi populasi terpinggirkan yang terkena dampak pandemi secara tidak proporsional. Akibatnya, dukungan untuk bisnis lokal telah memperoleh daya tarik, dengan pengakuan bahwa mereka adalah dan akan menjadi pemain kunci di jalan menuju pemulihan dan ketahanan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah memberikan penekanan yang kuat pada pengembangan ekonomi lokal di seluruh negeri, dan telah menempatkan langkah-langkah penting untuk menyelaraskan pengeluaran pemerintah untuk pengadaan dengan prioritas ini. Bersamaan dengan kampanye #BanggaBuatanIndonesia untuk mendorong minat dan permintaan barang dan jasa produksi dalam negeri, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ("Peraturan 12/2021") mewajibkan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk menggunakan setidaknya 40% anggarannya untuk mendapatkan produk dalam negeri dari usaha mikro dan koperasi. Prioritas untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengakses pasar melalui belanja pemerintah berpotensi mendorong upaya pemulihan ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

Dipandu oleh target keberlanjutan nasional Indonesia, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs), Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI) dan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional terhadap pengurangan emisi (NDC), pemerintah daerah merangkul komitmen keberlanjutan di seluruh negeri ("Target Keberlanjutan Nasional"). Ketahanan ekonomi lokal sangat terkait dengan kemampuan untuk mengurangi dampak negatif dari, dan beradaptasi dengan, perubahan iklim. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika data juga menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang bertujuan untuk keberlanjutan di tingkat lokal telah tumbuh secara konsisten di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. UMKM ini - „perusahaan ramah lingkungan“ - memiliki potensi untuk berkontribusi dalam perjalanan ini dengan menawarkan dampak triple bottom line - mengembangkan ekonomi lokal mereka, menyediakan lapangan kerja dan dampak sosial bagi masyarakat yang terpinggirkan di sepanjang rantai nilai mereka, dan berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang positif melalui pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, upaya ekonomi sirkular, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Peluang signifikan terletak pada lebih lanjut menghubungkan pengadaan dari perusahaan lokal dengan prioritas kebijakan untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim, sembari memberikan dukungan kepada UMKM. Sebagai pedoman, Indonesia telah mengeluarkan definisi khusus tentang produk dan jasa berkelanjutan di bawah Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang pelabelan pengadaan berkelanjutan ("Peraturan KLHK 5/2019"). Berdasarkan peraturan ini, produk dan jasa yang berkelanjutan harus sehat secara hukum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam di seluruh siklus hidup. Dengan memprioritaskan perusahaan ramah lingkungan dalam upaya pengadaan nasional dan lokal, kami dapat meningkatkan dukungan untuk #BanggaBuatanIndonesia dan UMKM, dan mempercepat upaya Indonesia untuk mencapai Target Keberlanjutan Nasional dan membangun kembali pasca-pandemi yang lebih baik.

Lab Kebijakan SEED untuk Pengadaan Berkelanjutan di Indonesia berupaya menghubungkan, menyatukan pemangku kepentingan utama publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi perusahaan ramah lingkungan dan menciptakan solusi bersama untuk menyelaraskan pengadaan nasional dan lokal dengan perusahaan yang memberikan berdampak pada manusia, pendapatan, dan planet ini. Diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Bappenas), Asosiasi Nasional untuk Pemerintah Kabupaten (APKASI), dan Asosiasi Kabupaten Lestari (Lingkar Temu Kabupaten Lestari - LKTL), dan mengintegrasikan suara-suara dari perusahaan eko-inklusif yang didukung SEED, laboratorium bertujuan untuk memastikan bahwa potensi UMKM berkelanjutan dibuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Saat kami bersiap di tingkat global untuk transisi ke ekonomi hijau dan inklusif, dan membangun kembali dengan lebih baik dari dampak pandemi Covid-19, sebuah pertanyaan kunci muncul. Bagaimana kita memastikan bahwa komitmen di tingkat global dan nasional diterjemahkan menjadi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal? Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) - pelaku inti di sektor swasta - memainkan peran penting dalam memastikan bahwa transisi ke ekonomi hijau dan inklusif didorong oleh solusi dari bawah ke atas dan terlokalisasi yang memanfaatkan peluang khusus yang tersedia bagi masyarakat untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Instrumen kebijakan penting untuk memfokuskan aksi iklim pada peluang dan kebutuhan lokal adalah keuangan. Keuangan dapat mengarahkan ke mana perhatian diberikan, inovasi mana yang ditingkatkan, dan sektor dan bisnis mana yang didukung untuk memberikan pekerjaan dan dampak ramah lingkungan. Praktik pengadaan pemerintah dapat menjadi faktor penting dalam mengarahkan komitmen pembiayaan, karena pengadaan publik dapat mencapai 15-30% dari PDB. Khususnya di tengah pandemi Covid-19, pemerintah telah memberikan paket bantuan tambahan. Oleh karena itu, melihat praktik pengadaan dan bagaimana kaitannya dengan kegiatan UMKM di tingkat lokal merupakan peluang untuk

memajukan komitmen global dan mengembangkan ekonomi hijau dan inklusif saat kita membangun kembali dengan lebih baik.

Di Indonesia, pengadaan publik menyumbang hanya di bawah setengah dari semua belanja kementerian, lembaga dan pemerintah daerah; pada tahun 2019, pengeluaran pengadaan di Indonesia berjumlah lebih dari 80 miliar dolar.⁽¹⁾ Oleh karena itu, peluang untuk mengarahkan pembiayaan ini ke produk dan layanan cerdas iklim yang diproduksi secara lokal sangat penting, dan menunjukkan peran penting bagi pemerintah daerah untuk terhubung dengan UMKM yang beroperasi di daerah mereka.

Diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Bappenas) dan Asosiasi Daerah Berkelanjutan (Lingkar Temu Kabupaten Lestari - LKTL), sebuah asosiasi pemerintah kabupaten yang didedikasikan untuk pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan, Lab Praktisi SEED 2021 untuk Pembuatan Prototipe Kebijakan akan melihat pengadaan berkelanjutan di tingkat kabupaten, dan bagaimana memperkuat tautan dan akses UMKM ke proses pengadaan.

Apa itu perusahaan ramah lingkungan?

Istilah “perusahaan yang eko-inklusif” mengacu pada perusahaan dengan model bisnis yang pada intinya 1) ekologis yaitu berkontribusi pada mitigasi dan/atau adaptasi terhadap perubahan iklim, atau menerapkan langkah-langkah keberlanjutan lingkungan dan sosial yang lebih luas seperti menggunakan metode produksi yang berkelanjutan, berkontribusi pada penggunaan sumber daya yang efisien, mengelola limbah, atau melestarikan keanekaragaman hayati; dan 2) inklusif yaitu menciptakan lapangan kerja lokal, khususnya untuk populasi yang sering terpinggirkan seperti kaum muda, perempuan dan rumah tangga berpenghasilan rendah, dan dengan mengintegrasikan komunitas-komunitas ini ke dalam rantai nilai lokal dan global sebagai pemasok, distributor, atau pelanggan. Perusahaan ramah lingkungan merupakan kontributor utama pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan inklusif, yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Lab Praktisi SEED untuk Pembuatan Prototipe Kebijakan

Lab Praktisi SEED untuk Pembuatan Prototipe Kebijakan menawarkan kesempatan bagi pemangku kepentingan ekosistem utama untuk berkontribusi pada penetapan agenda kebijakan, meningkatkan implementasi kebijakan, dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan penargetan kebijakan. Dengan berkolaborasi lintas kelompok pemangku kepentingan (praktisi kebijakan, organisasi pendukung UMKM, dan UMKM) untuk mengembangkan solusi kebijakan, peserta Lab memainkan peran penting dalam membentuk lanskap kebijakan Indonesia dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi UMKM.

1. MENYESUAIKAN KOMITMEN GLOBAL DENGAN DAMPAK LOKAL

Selama dekade terakhir, Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengubah negara ini menjadi salah satu ekonomi utama Asia. Indonesia saat ini adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara (dan terbesar keenam belas di dunia), telah tumbuh dengan stabil selama dekade sebelumnya.¹ 2 Indonesia juga menikmati sumber daya alam yang melimpah, mulai dari lahan hutan, lahan gambut, wilayah pesisir, hutan hujan yang menduduki peringkat terbesar ketiga di dunia, dan keanekaragaman hayati yang signifikan. Kemajuan yang signifikan telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir untuk mengurangi kemiskinan, yang berkurang setengahnya dari 24% pada tahun 1999 menjadi 9,78% pada tahun 2020 sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Sebagaimana dibuktikan oleh guncangan ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19 secara global, masalah lebih lanjut - seperti dampak perubahan iklim - dapat mengancam hasil yang dicapai dalam pengurangan kemiskinan, dan memperkenalkan tantangan dan peluang baru untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai perekonomian yang memiliki kepadatan penduduk yang signifikan dan bergantung pada sumber daya alam, dampak perubahan iklim akan memegang peranan penting baik pada tingkat ekonomi maupun sosial di Indonesia. Perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan laut, dan peristiwa iklim lainnya seperti banjir dan kekeringan dapat merugikan Indonesia, seperti yang diperkirakan oleh Bank Pembangunan Asia, sekitar 2,5-7% dari PDB pada tahun 2100.²

Dalam upaya untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia bergabung dengan 195 negara lain untuk menandatangani Perjanjian Paris pada tahun 2015, bermaksud untuk membatasi suhu rata-rata global hingga „jauh di bawah“ 2 derajat Celcius (idealnya 1,5 derajat Celcius) di atas tingkat pra-industri. 127 negara (termasuk Indonesia) telah berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 26% (41% dengan bantuan internasional) dibandingkan dengan skenario business-as-usual pada tahun 2030.³ Sebagian besar baru-baru ini, Indonesia telah menyelesaikan Laporan Pembaruan Dua Tahunan

Kedua pada tahun 2018 untuk memantau kemajuan di sepanjang kegiatan pengurangan emisi yang diuraikan dalam NDC-nya.⁴

Pemerintah Indonesia membuat kemajuan dalam mengintegrasikan kebijakan dan kegiatan keberlanjutan ke dalam rencana dan prioritas nasionalnya.⁵ Hal ini memainkan peran penting dalam rencana pembangunan pemerintah yang utama, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional lima tahun, yang menetapkan cabang eksekutif s tujuan pembangunan.⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan merata, mengembangkan daerah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, revolusi mental dan pembangunan budaya, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan layanan dasar, memperkuat lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan serta transformasi layanan publik. Sebagai bagian dari strategi implementasi, BAPPENAS juga menjadi tuan rumah Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)⁷ serta Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon.⁸

a. Mengarusutamakan prioritas kebijakan berkelanjutan dalam pengadaan

Hal penting bagi pemerintah untuk mengarusutamakan komitmen tingkat global dan nasional di tingkat lokal adalah melalui pengadaan publik. Terhitung antara 13-20% dari PDB di banyak negara⁹, ini merupakan pasar yang signifikan di mana prioritas kebijakan dapat dikomunikasikan. Ini bahkan lebih relevan dalam konteks pandemi Covid-19, di mana pemerintah telah meningkatkan pengeluaran untuk memberikan bantuan darurat. Di Indonesia, APBN meningkat sebesar 1 miliar USD antara tahun 2020-2021, sepadan dengan peningkatan belanja pengadaan pada periode yang sama.¹⁰

Namun, COVID-19 berdampak negatif pada besaran anggaran untuk pelaksanaan aksi mitigasi serta program

1 OECD. (2018). *SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264306264-en>

2 Asian Development Bank (2021). *Climate Risk Country Profile Indonesia*. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/700411/climate-risk-country-profile-indonesia.pdf>

3 UNFCCC. (2016). *First Nationally Determined Contribution Indonesia*. https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20202016.pdf

4 UNFCCC. (2020). *Indonesia Second Biennial Update Report*. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FSV_Climate%20Dialogues%202020_Indonesia.pdf

5 PAGE. (2018). *Indonesia PAGE Partner Country*. <https://www.un-page.org/Indonesia%20country>

6 OECD (2018).

7 <http://sdgs.bappenas.go.id/tentang/>

8 <https://lcdi-indonesia.id/sekretariat/>

9 World Bank. (2020). *Global Public Procurement Database: Share, Compare, Improve!* <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/03/23/global-public-procurement-database-share-compare-improve>. Other sources indicate that public procurement spending could range between 15-30%; see *The Economist Intelligence Unit*. (2020). *The future of public spending*. https://content.unops.org/publications/Thefutureofpublicspending_EN.pdf?mtime=20200623084321&focal=none

10 UNODC (2021).

dan kegiatan pembangunan rendah karbon. Sebagai akibat dari penurunan kegiatan sosial ekonomi dalam menanggapi penyebaran Covid-19, pembangunan rendah karbon seperti reboisasi, pencegahan deforestasi, peningkatan kapasitas Energi Terbarukan dan efisiensi energi akan terkena dampak negatif, menghambat upaya pengurangan emisi. Perpres 112/2020 diterbitkan untuk memperkuat Rencana Tahunan Nasional 2021 tentang Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial pasca-Covid serta mendorong iklim industri, pariwisata, dan investasi.¹¹ Perpres ini menetapkan urgensi untuk menerapkan kriteria keberlanjutan ke dalam upaya pemulihan ekonomi.

Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan sistem dukungan dan akses pasar untuk produk dan layanan lokal yang ditawarkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia melalui kampanye #BanggaBuatanIndonesia (Bangga Produk Lokal Indonesia) mulai tahun 2020. Kampanye tersebut berhasil memasukkan kuota minimal barang dan jasa lokal dalam sistem pengadaan publik. Penguatan proses pengadaan nasional Indonesia telah menjadi salah satu fokus area untuk memberdayakan pasar lokal guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Hal tersebut telah diatasi melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Umum dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-08/MBU/12/2019 tentang Pengadaan Umum yang mengutamakan pembelian barang dan jasa dalam negeri. Dengan mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam keputusan pengadaan ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang ini untuk membangun ekonomi hijau dan inklusif di tingkat lokal melalui akses pasar yang nyata bagi UMKM mereka.

b. Menetapkan peraturan untuk pengadaan yang berkelanjutan dan lokal

Isu mempromosikan pengadaan produk yang berkelanjutan telah ditangani baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana pula dengan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa.

Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Pelabelan Pengadaan Berkelanjutan, Indonesia telah menetapkan beberapa indikator inti untuk mendefinisikan produk dan jasa yang berkelanjutan. Pelabelan ini berlaku untuk semua produk dan layanan yang (i) berbasis pemanfaatan energi, (ii) berbasis alam dan (iii) berbasis daur ulang. Peraturan tersebut juga menggarisbawahi bahwa pelabelan akan dilakukan dalam bentuk sertifikasi, yang disediakan oleh sistem yang ada di bawah pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi lain yang diakui bersama. Dari segi proses, produk dan layanan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan harus (i) sehat secara hukum - termasuk memiliki sistem Rantai Penjagaan, (ii) menjunjung tinggi prinsip-prinsip ramah lingkungan di seluruh siklus hidupnya, (iii)

bertanggung jawab dalam proses produksinya dan (iv) berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ("Peraturan 12/2021") memberikan lebih banyak peluang bagi pelaku usaha mikro dan koperasi untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa publik. Mengubah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 ("Peraturan Sebelumnya"). PP 12/2021 merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja atau Omnibus Law yang diundangkan pada Oktober 2020. Permen 12/2021 saat ini mewajibkan Kementerian/Lembaga/Pemda untuk menggunakan minimal 40% anggarannya untuk memperoleh produk dalam negeri dari usaha mikro dan koperasi, padahal dalam Perpres sebelumnya tidak disyaratkan persentase tertentu. PP 12/2021 juga melakukan amandemen terhadap ketentuan tentang hal-hal lain (misalnya kontrak pengadaan, metode dan penyelesaian sengketa) untuk kemudahan berbisnis terkait pengadaan publik. Selanjutnya di bawah Peraturan 12/2021, Toko Daring (Toko Online) sekarang digambarkan sebagai sumber e-purchasing untuk memilih penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Pengadaan dengan menggunakan Toko Daring akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pengadaan Umum Nasional.

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-10/MBU/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Peningkatan Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Negara, yang juga sejalan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Penerbitan tersebut mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara wajib mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, serta perluasan peluang usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga ini memberikan kesempatan untuk mempromosikan kriteria sosial dalam praktik pengadaan dengan melatih spesialis pengadaan pemerintah untuk memimpin perubahan budaya dan pengembangan kebijakan dan perangkat pengadaan publik. Praktik pengadaan publik saja dapat menjadi faktor penting dalam mengarahkan komitmen pembiayaan, karena menyumbang 15-30% dari PDB.^{12 13} (Unit Intelijen Ekonomi Terbatas, 2020). Sayangnya, pedoman pengadaan berkelanjutan belum diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan yang ada. Dengan demikian, masih ada celah untuk mengubah #BanggaBuatanIndonesia menjadi #BanggaBuatanIndonesia yang berkelanjutan - memanfaatkan potensi penuh UMKM untuk mendukung transisi ekonomi hijau dan inklusif di Indonesia.

¹¹ Nugraheni, Ninis, Hening Prabawa Arifanda, Alifhan Astafiyani. (2020). *Public Procurement Contract for Goods and Services Following the Presidential Decree Number 12 of 2020 on the Stipulation of the Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic as a National Disaster*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a5>

¹² The Economist Intelligence Unit Limited. (2020). *The Future of Public Spending*.

2. PERAN UMKM INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TINGKAT LOKAL

UMKM berada pada posisi yang baik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dengan memberikan produk dan layanan cerdas iklim kepada masyarakat yang terpinggirkan, dengan demikian mengatasi pengurangan kemiskinan dan mempromosikan pembangunan rendah karbon. Lab Kebijakan untuk proses Pengadaan Berkelanjutan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Bappenas dan LTKL dengan SEED, akan mengeksplorasi jalan ke depan

untuk mengintegrasikan praktik pengadaan berkelanjutan di tingkat kabupaten dan menghubungkan perusahaan berkelanjutan dengan peluang pasar ini.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendefinisikan UKM berdasarkan Undang-Undang Nasional 20/2008 (Pasal 6) menurut kekayaan bersih maksimum mereka tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan beroperasi, dan pendapatan tahunan.

	Usaha mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
NILAI BERSIH (excluding land and structures)	Maksimal Rp 50 juta	Lebih besar dari Rp 50 juta tetapi kurang dari Rp 500 juta	Lebih dari Rp 500 juta tapi kurang dari Rp 10 miliar
PENDAPATAN TAHUNAN	Maksimal Rp 300 juta	Lebih besar dari Rp 300 juta tetapi kurang dari Rp 2,5 miliar	More than IDR 2.5 billion but less than IDR 50 billion

a. UMKM memiliki potensi untuk menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan

Secara global, UKM memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan bersama. Mereka menyumbang 99 persen dari semua perusahaan, menghasilkan sekitar 60% lapangan kerja.¹³ globalisasi. Mereka menghasilkan pekerjaan di berbagai wilayah geografis dan industri, mempekerjakan beragam segmen tenaga kerja.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 99,99 persen (62,9 juta unit) dari seluruh pelaku usaha di Indonesia (Purwanto, 2020). Jika digabungkan, kegiatan ekonomi UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto Indonesia secara keseluruhan (sekitar Rp 8160 triliun dari PDB Rp 13600 triliun pada tahun 2017).¹⁴

PERKIRAAN KONTRIBUSI PDB TAHUNAN

MIKRO

Rp 5000 triliun

KECIL

Rp 1300 triliun

SEDANG

Rp 1800 triliun

BESAR

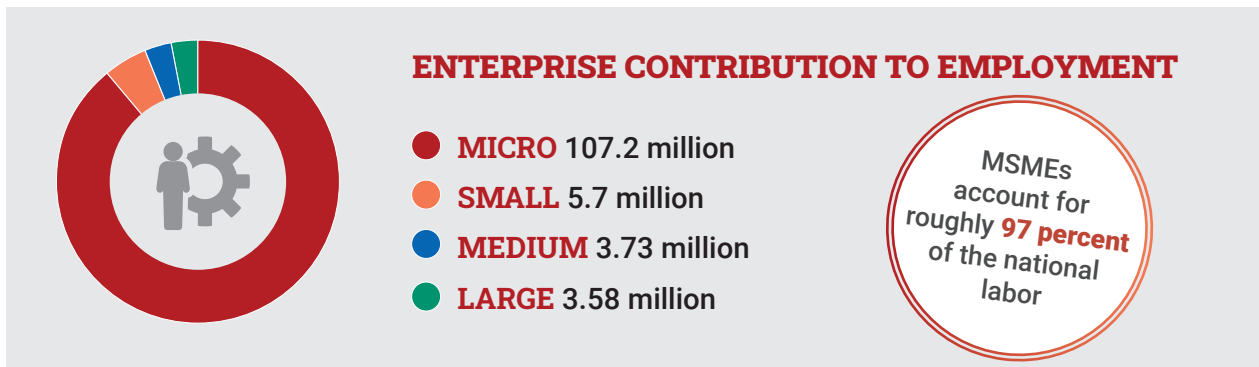
Rp 5400 triliun

¹³ OECD. (2019). *Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth*. <https://doi.org/10.1787/c19b6f97-en>

¹⁴ Data from the Ministry of SMES (2017). Taken from Haryanti, D., & Hidayat, I. (2018). *Portrait of Indonesian MSMEs: Little Ones Who Play a Big Role | Indonesian SMEs*. <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>

	Units	% unit bisnis	Pendapatan Total (Triliun rupiah)	% Kontribusi terhadap PDB	Pendapatan rata-rata per unit bisnis (Rupiah/ tahun)
MIKRO	62,106,900	98.70	4,272.99	34.12	76,126,646.15
KECIL	757,090	1.20	1,234.21	8.91	1,630,202,485.83
SEDANG	58,627	0.11	1,742.44	12.57	29,720,777,116.35
BESAR	5,460	0.01	5,136.22	37.07	940,699,633,699.63
TOTAL	62,928,077	100	12,841	93	

Selain kontribusi terhadap PDB, UMKM merupakan kontributor penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Secara total, UMKM menyumbang sekitar 97% dari angkatan kerja nasional.¹⁵



b. UMKM aktif di sektor-sektor utama untuk pertumbuhan hijau

Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia mengklasifikasikan UKM menjadi UKM pertanian dan non-pertanian. Perusahaan pertanian diperkirakan menggunakan Sensus Pertanian 2013, dan perusahaan non-pertanian menggunakan Sensus Ekonomi 2016. Haryanti dan Hidayah (2018) memperkirakan terdapat 26.135.469 Usaha Pertanian; di antaranya, 0,016 persen, atau sekitar 4.200, adalah perusahaan legal. Sensus Ekonomi BPS 2016 memperkirakan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah non-pertanian sebanyak 26.263.649 unit. Dimana setengah dari UMKM bergerak di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, setengah lainnya dari usaha mikro dan kecil bergerak dalam perdagangan besar dan eceran (63,5%), manufaktur (16,7%), jasa lainnya (10,7%) dan transportasi dan komunikasi (7,3%).¹⁶

Lanskap perdagangan dan investasi Indonesia saat ini menyorot peluang bagi pemerintah daerah untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam meningkatkan potensi perdagangan dan investasi negara. Pertanian sebagai sektor masih memberikan pendapatan bagi sebagian besar

rumah tangga Indonesia - dengan sekitar 41 persen dari total angkatan kerja Indonesia dipekerjakan oleh sektor tersebut. Ada permintaan global, regional, dan domestik yang meningkat di sektor ini untuk menghasilkan komoditas berkelanjutan yang menyeimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Memproduksi komoditas yang berkelanjutan akan membutuhkan pemangku kepentingan utama untuk berinvestasi pada transformasi rantai pasokan jangka panjang. Investasi dalam arti luas dapat mencakup modal atau ekuitas, jaringan, pengembangan kapasitas, dan eksposur melalui media dan/atau acara. Hingga saat ini, transformasi komoditas berkelanjutan telah menjadi agenda penting bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia.¹⁷ Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) memiliki beberapa anggota kabupaten di Indonesia seperti Siak, Riau dan Sintang, dan Kalimantan Barat, dan berfokus pada pemberdayaan lingkungan. - UMKM inklusif untuk menciptakan produk bernilai tambah berkelanjutan yang berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pendekatan kawasan ekonomi pedesaan.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Haryanti & Hidayah. (2018)

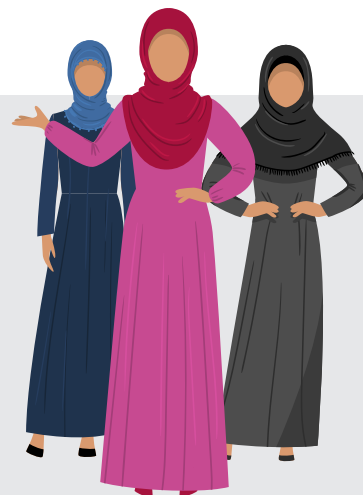
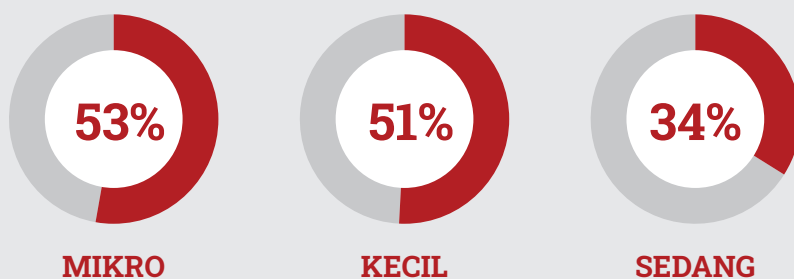
¹⁷ LTKL. (2020). Mapping Commitment of Subnational Government to Sustainable Land Use in Southeast Asia. https://jaresourcehub.org/wp-content/uploads/2021/02/Buku_LTKL-TFA-Report_Final.pdf

c. UMKM mengatasi ketidaksetaraan melalui dampak sosial

UMKM juga memberikan dampak sosial dengan mengintegrasikan komunitas yang terpinggirkan di sepanjang rantai nilai mereka, sebagai pemberi kerja, pemasok, karyawan, dan pembeli. Menurut survei tahun 2016, 52,9% usaha mikro Indonesia dimiliki oleh perempuan; 50,6% usaha kecil, dan 34% usaha menengah.¹⁸ Oleh karena itu, peluang tumbuh bagi UMKM dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan pendapatan bagi perempuan, pengurangan kesenjangan, dan pembangunan ekonomi inklusif dengan melibatkan daerah pedesaan. Mengingat penyebaran geografis Indonesia, ada peran penting bagi regulator lokal untuk mengaktifkan UMKM lokal dengan menerapkan kebijakan, rencana, dan program yang relevan di wilayah yang direncanakan.

Sektor UMKM sosial didominasi oleh pemimpin muda berusia 25-34 tahun, dengan jumlah yang hampir sama laki-laki (41%) dan perempuan (40%) memimpin usaha sosial.¹⁹ Pada tahun 2018, diperkirakan 342.000 usaha sosial memberikan kontribusi potensial 1,7 % terhadap PDB Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, ekosistem menunjukkan pertumbuhan yang signifikan (70% dari tahun 2015), terutama terfokus pada industri kreatif (22%), pertanian (16%) dan pendidikan (15%). Mayoritas perusahaan sosial beroperasi baik di tingkat lokal (37%) atau nasional (35%), bukan di skala regional (2-3 provinsi).²⁰

PERUSAHAAN MILIK PEREMPUAN DI INDONESIA



d. Potensi yang belum tergarap di sektor UMKM di Indonesia

Meskipun mewakili sebagian besar sektor swasta, UMKM di Indonesia umumnya tetap kecil karena hambatan dalam menumbuhkan dan meningkatkan skala usaha mereka. Sebagian besar sektor ini tetap informal: lebih dari 70% lapangan kerja nasional dan lebih dari 90% dari total perusahaan komersial diperkirakan bersifat informal. Informalitas yang meluas memiliki efek

yang merugikan pada kinerja UMKM Indonesia karena perusahaan informal harus beroperasi di bawah radar otoritas negara dan dengan demikian ragu-ragu untuk melakukan investasi jangka panjang.²¹ Hal ini mengarah ke bidang-bidang potensi yang belum dimanfaatkan dalam sektor ini, misalnya dalam:

Produktivitas tenaga kerja



Menurut Asian Labour Productivity Organization (APO), rata-rata produktivitas tenaga kerja Indonesia (PDB per pekerja) pada tahun 2016 lebih tinggi dari rata-rata ASEAN. Namun, ini menyembunyikan perbedaan yang signifikan dalam sektor UMKM Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, PDB per pekerja di usaha mikro hanya 3% dari PDB per pekerja di perusahaan besar. Sebagai perbandingan, PDB per pekerja di perusahaan kecil dan menengah masing-masing adalah 16% dan 31% dari PDB per pekerja di perusahaan besar. Antara tahun 2006 dan 2013, pertumbuhan produktivitas rendah di semua kelas ukuran perusahaan, dengan tingkat tahunan rata-rata 1,1 persen untuk usaha mikro, 0,3 persen untuk usaha kecil, dan 0,6 persen untuk perusahaan menengah.²²

18 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/260f2097-e440-4599-91ec-e42d45cf3913/SME+Indonesia+Final_Eng.pdf?MOD=AJPERES&CVID=1j8qhPY

19 British Council (2018). *The State of Social Enterprise in Indonesia*. https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/the_state_of_social_enterprise_in_indonesia_british_council_web_final_0.pdf

20 Ibid

21 OECD, 2018.

22 World Bank (2015). *Enterprise Survey Data Indonesia*. <https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2665>



Integrasi rendah ke pasar global

Perusahaan besar adalah yang utama dalam mendorong kegiatan ekspor Indonesia. Ini telah menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. Antara tahun 2006 dan 2013, proporsi total ekspor perusahaan menengah (tidak termasuk minyak dan gas) menurun dari 12,2 persen menjadi 11,5 persen. Proporsi ekspor usaha kecil turun dari 4% menjadi 2,8 persen, dan proporsi ekspor usaha mikro turun dari 1,7 persen menjadi 1,4 persen. UMKM sering bergerak di sektor ekspor seperti makanan, minuman, tekstil, sepatu, kerajinan tangan dan furnitur.²³



Penelitian dan Pengembangan, Inovasi

UKM memberikan porsi yang cukup besar dari keseluruhan investasi di Indonesia, terhitung 56,2% dari keseluruhan investasi pada tahun 2013.²⁴ Antara tahun 2006 dan 2013, persentase keseluruhan investasi oleh perusahaan menengah meningkat dari 22,4 persen menjadi 30,9 persen. Menurut Bank Dunia, hanya 2% perusahaan Indonesia yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D); angka ini melonjak menjadi 10% untuk perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan. Pengeluaran R&D yang rendah juga tercermin dalam hasil inovasi: dalam tiga tahun sebelumnya, hanya 5% usaha kecil dan 9,7% usaha menengah di Indonesia yang meluncurkan produk atau layanan baru.

²³ Asian Development Bank. (2020). Asia SME Monitor Volume 1. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/646146/asia-sme-monitor-2020-volume-1.pdf>
²⁴ Ministry of Co-operatives and SMEs

SOROTAN PERUSAHAAN EKO-INKLUSIF



MYCOTECH

Pemenang SEED Low Carbon Award 2019

Penanganan limbah | Bandung, Indonesia

Mylea adalah kulit vegan jamur yang dibuat oleh Mycotech. Mycotech bekerja dengan desainer untuk mengubah Mylea menjadi barang jadi melalui strategi investasi bersama. Mereka berharap dapat membangkitkan kesadaran lingkungan yang lebih besar dalam bisnis fesyen dan memproduksi bahan revolusioner ini sebagai pengganti kulit berbasis ternak.

DAMPAK

Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterampilan dan memberikan pekerjaan yang baik bagi 270 (64% perempuan) petani jamur, dengan potensi untuk berkembang menjadi 53.000 petani jamur di seluruh nusantara. • Meningkatkan pendapatan petani melalui penjualan limbah pertanian
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi 10,6 miliar kilogram CO₂ per tahun dengan produksi 1 juta kaki persegi dari Mylea • Pengurangan penggunaan sumber daya karena waktu panen kulit yang lebih pendek jika dibandingkan dengan kulit sapi (5 hari vs 2 tahun dan 45L vs 80.000L air yang digunakan)
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan ekonomi baru di industri kulit sintetis dan mempromosikan mode berkelanjutan (total pasar senilai USD1,3T) • Berkontribusi pada gerakan industri mode menuju ekonomi hijau, karena Mylea menarik sejumlah besar bisnis mode kelas atas



RAHSA NUSANTARA

Finalist SEED Low Carbon Award 2019

Biodiversitas | Bandung, Indonesia

Rahsa Nusantara dimulai dengan pengetahuan yang diambil dari Pulau Jawa dan barang-barang yang dimaksudkan untuk membantu hidup sehat, termasuk teh siap minum, drippers, dan suplemen. Mereka membuat produk mereka dari zat yang ditemukan di sekitar, dan mendaur ulang sampah organik. Menghargai bahwa setiap lokasi memiliki jenis kearifan tertentu yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah lokal, bisnis ini berupaya mengungkap dan memanfaatkan kearifan terbaik tersebut dalam memberikan gaya hidup dan warisan baru untuk masa depan.

DAMPAK

Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Memberdayakan perempuan - terutama ibu (80% pekerja kami) - yang berpendidikan rendah di perkotaan melalui pekerjaan • Meningkatkan kesehatan masyarakat yang terpinggirkan dengan menjual produk dengan harga murah
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan ekonomi sirkular ke dalam setiap langkah proses produksi mulai dari sumber organik bahan, pengemasan yang bertanggung jawab hingga pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pendapatan keluarga karyawan wanita sebesar 60%, meningkatkan pendapatan petani pemasok bahan baku • Menawarkan produk suplemen kesehatan dengan harga lebih rendah untuk mencegah penyakit, menghemat biaya pengobatan yang mahal bagi orang-orang yang terpinggirkan



Rahsa Nusantara

3. TANTANGAN YANG DIHADAPI UMKM DI INDONESIA UNTUK MENCAPAI SKALA

Mengembangkan potensi di sektor UMKM di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja hijau yang produktif, mengeksport produk dan layanan yang berkelanjutan, dan mengembangkan inovasi cerdas iklim bertumpu pada pengembangan pasar di mana perusahaan-perusahaan ini dapat meningkatkan produk dan layanan mereka, menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas dan menghasilkan keuntungan yang dapat diinvestasikan kembali untuk R&D.

Tantangan umum yang dihadapi UMKM lokal yang berkelanjutan adalah mengakses pasar untuk produk dan layanan mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini berkaitan dengan pasar ekspor; di tempat lain ke pasar lokal. Seringkali, akses ke pasar terhalang oleh informalitas atau kurangnya pendaftaran usaha, manajemen dan kapasitas usaha yang rendah, dan akses yang terbatas ke kluster industri.²⁵ Akses ke tantangan pasar semakin diperburuk oleh kurangnya validasi model bisnis, publisitas dan instrumen pemasaran yang memungkinkan mereka untuk mengkomunikasikan kecocokan produk-pasar dengan target pasar mereka.

Tantangan lain yang sering dikutip untuk pertumbuhan UMKM adalah akses ke pembiayaan. Pinjaman UMKM hanya menyumbang 7% dari PDB. Perusahaan tidak memiliki akses ke kredit dan bentuk keuangan lainnya sebagian karena rendahnya tingkat inklusi dan manajemen keuangan, persyaratan agunan, dan peraturan yang memberatkan.²⁶ Temuan ini dikuatkan dengan laporan komprehensif dari Angel Investor Network tentang topik Keuangan Sosial di Indonesia, yang melaporkan 70% dari usaha sosial di Indonesia berada dalam tahap pra-bibit dan benih, yang akan membutuhkan dana berkisar antara USD 10.000-150.000. Oleh karena itu, perusahaan sosial di Indonesia menghadapi kesenjangan pendanaan berukuran tiket kecil, ketika perusahaan tahap awal mungkin tidak siap untuk menyerap suntikan modal di luar kisaran yang disediakan oleh investor dampak saat ini di ekosistem.²⁷

Banyak dari tantangan ini diperparah oleh dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. 90% UMKM yang disurvei oleh UNDP dan Universitas Indonesia – Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPEM FEB UI) menunjukkan bahwa mereka menghadapi permintaan

pasar yang lebih rendah. Lebih dari 45% menghadapi masalah dalam mendapatkan bahan baku, dan lebih dari 80% memiliki margin keuntungan yang lebih rendah. Pandemi juga berdampak pada aset yang dimiliki oleh perusahaan, dengan lebih dari 53% melaporkan penurunan aset.²⁸

Untuk perusahaan yang berbasis di luar pusat kota dan kluster pendukung UMKM di Jawa dan Bali, mengakses dukungan untuk mengatasi hambatan ini bisa jadi sulit. Banyak program UKM berbasis di daerah perkotaan, dan karena itu tidak menjangkau penerima di wilayah lain. Meskipun ada pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan seperti usaha sosial di Indonesia dalam lima tahun terakhir, usaha ini sering beroperasi di luar ibukota. Menurut laporan BCG (2015), sebagian besar wirausaha sosial, bersama dengan sebagian besar sumber daya ekonomi Indonesia, berlokasi di Jawa (46%).²⁹ Mendorong wirausahawan sosial untuk menggunakan potensi lokal dan menciptakan lebih banyak peluang di daerah pedesaan dapat menjadi daya tarik faktor dalam upaya untuk memperlambat laju urbanisasi, sehingga mengurangi distribusi kekayaan yang tidak merata dan kondisi kehidupan sosial yang menurun di kota serta mengatasi pembangunan sosial dan peningkatan ekonomi di tingkat nasional.

Oleh karena itu, menjawab tantangan yang dihadapi UMKM merupakan aspek integral baik dalam pemulihan ekonomi jangka pendek dari pandemi Covid-19 maupun pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Penguatan dukungan melalui pemerintah daerah dapat menjadi kunci untuk memelihara lingkungan yang mendukung bagi UKM lokal di daerah pinggiran seperti yang relevan dengan kabupaten anggota LTKL.

25 Asian Development Bank. (2020).

26 International Labour Organization. (2019). *Financing Small Business in Indonesia*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/--ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms_695134.pdf

27 Angel Investor Network. (2016). *Social Finance and Social Enterprises*. <https://www1.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/INS-SF%20Report2%20ANGIN.PDF>

28 UNDP and University of Indonesia. (2020). *Impact of Covid-19 Pandemic on MSMEs in Indonesia*. <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2021/docs/INS-Report%20Impact%20of%20COVID-19%20Pandemic%20on%20MSMEs%20in%20Indonesia.pdf>

29 Boston Consulting Group (2015). *The Art of Sustainable Giving: Priorities to Accelerate Social Enterprise Growth in Indonesia*. https://image-src.bcg.com/The-Art-of-Sustainable-Giving-May-2015_tcm93-40480.pdf

4. KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN UMKM DI INDONESIA

Pengadaan publik yang berkelanjutan berarti lembaga pemerintah harus mempertimbangkan kelayakan ekonomi jangka panjang, meminimalkan dampak lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial saat pengadaan barang, jasa, atau pekerjaan untuk mendukung kegiatan mereka. Pengadaan publik memiliki potensi untuk menawarkan transaksi reguler dan jangka panjang yang memberikan stabilitas yang dibutuhkan untuk perusahaan ramah lingkungan, karena sebagian besar usaha kecil mengandalkan proyeksi mingguan untuk mempertahankan pangsa pasar dan relevansi mereka. Terutama selama pandemi Covid-19, sebagian besar bisnis rentan secara finansial: lebih dari sebelumnya, inisiatif sistematis dan intervensi pemerintah diperlukan untuk merevitalisasi ekosistem kewirausahaan.³⁰ Oleh karena itu, peluang untuk mengarahkan peluang ini ke produk dan layanan berkelanjutan yang diproduksi secara lokal sangat penting, dan menunjukkan peran penting bagi pemerintah daerah untuk menjalin hubungan dengan UMKM yang beroperasi di wilayahnya.

Pemerintah Indonesia mengakui UMKM sebagai pendorong penting inklusi sosial dan kekayaan ekonomi, dan telah menjadikannya prioritas kebijakan dengan mengesahkan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional (UU 20/2008) dan membentuk Kementerian UKM (Kementerian Koperasi dan UKM). Hal ini dilengkapi dengan RUU Kewirausahaan Nasional yang telah memasukkan definisi kewirausahaan sosial sebagai bagian dari tipologi kewirausahaan yang diakui di Indonesia. Meski RUU Kewirausahaan Sosial telah diganti dengan RUU Kewirausahaan Nasional, pemerintah telah menunjukkan urgensi dalam membina ekosistem kewirausahaan di Indonesia sebagai salah satu agenda Rencana Pembangunan Nasional.

Selain UU UMKM dan Kementerian Koperasi dan UKM, berbagai program telah diluncurkan untuk mendukung pengembangan UMKM (berkelanjutan). Banyak diantaranya berpusat pada digitalisasi dan ekonomi digital, termasuk namun tidak terbatas pada Program UMKM GO Online, Program Sejuta Domain .id, dan program 1000 Startup Digital. Terwujudnya Koperasi dan UKM yang Sehat, Kuat, Tangguh dan Mandiri untuk Berkontribusi pada Perekonomian Nasional (visi dan misi 2015–2019) Kementerian Koperasi dan UKM, misalnya, berupaya meningkatkan akses keuangan, meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas usaha, antara lain tujuan.

Program lebih lanjut telah melihat secara khusus peran UMKM dalam industri dan dalam mengembangkan produk lokal di seluruh negeri, seperti Masterplan Pengembangan Industri Nasional 2015-2035 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Rencana tersebut juga terlihat secara regional, misalnya melalui 6 koridor ekonomi: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua Kepulauan Maluku. Upaya pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan dengan fokus pada pemberdayaan usaha masyarakat eko-inklusi untuk menciptakan produk bernilai tambah berbasis alam dilakukan di beberapa kabupaten di Indonesia seperti Siak, Riau dan Sintang, Kalimantan Barat.

Ada peluang signifikan untuk mempercepat penyertaan kriteria keberlanjutan dalam kebijakan pengadaan dan mengaitkannya dengan kebijakan dan kerangka kerja dukungan perusahaan. Sebagai contoh, arah kebijakan pengadaan yang berkelanjutan dapat menawarkan upaya pemulihan ekonomi jangka pendek kepada UMKM dari Pandemi Covid-19 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang.



³⁰ Maritz, Alex, Aron Perenyi, Gerrit de Waal and Christoph Buck. (2020). Sustainability 12(11). Entrepreneurship as the Unsung Hero during the Covid-19 Economic Crisis. <https://doi.org/10.3390/su12114612>

PELAKU EKOSISTEM



Pemerintah Pusat merupakan pemangku kepentingan penting dalam merancang strategi pengadaan yang akan mendorong produk dan layanan lokal yang berkelanjutan, sebagai pembuat kebijakan inti dan fasilitator. Pada awalnya, terdapat tiga klaster spesifik dari pelaku pemerintah nasional, yaitu a) ekosistem pengadaan, b) ekosistem UMKM, dan c) ekosistem keberlanjutan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nasional (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri merupakan aktor inti ekosistem pengadaan. Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri merupakan pelaku inti ekosistem UMKM. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah aktor inti ekosistem keberlanjutan. Sebagai anggota **Kemitraan Aksi Ekonomi Hijau**, Bappenas menyediakan kerangka kerja bagi kebijakan pertumbuhan hijau di tingkat nasional.



Pemerintah daerah juga merupakan pemangku kepentingan penting dari desain dan implementasi strategi pengadaan yang mendorong produk dan layanan lokal yang berkelanjutan. Mayoritas UMKM juga akan beroperasi di bawah yurisdiksi pemerintah daerah. Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota adalah kunci keberhasilan pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan. Di tingkat kabupaten, Asosiasi Nasional Pemerintah Kabupaten (APKASI) telah menunjuk LTKL sebagai kaukus untuk menggarap lintas program dan mengarusutamakan keberlanjutan ke dalam model pembangunan daerah khususnya di tingkat kabupaten. Pendiri dan anggota kabupaten LTKL berkomitmen untuk menerapkan model penggunaan lahan berkelanjutan yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan dan kolaborasi. Saat ini, asosiasi memiliki 9 kabupaten anggota aktif di 6 provinsi di Indonesia termasuk kabupaten Musi Banyuasin, Aceh Tamiang, Siak, Labuhanbatu Utara, Rokan Hulu, Batanghari, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sigi, Gorontalo, Bone Bolango.



Program dukungan bisnis meliputi Pusat PLUT-KUMKM untuk dukungan bisnis non-keuangan, program Iptekda LIPI, yang mendukung penelitian dan pengembangan di dalam UKM. Ini juga mencakup pusat inkubasi dan akselerasi seperti Intellar.



UMKM adalah inti dari penerapan praktik pengadaan yang berkelanjutan di tingkat lokal, karena mayoritas beroperasi di bawah pemerintah daerah. UMKM yang memberikan dampak triple bottom line - sosial, lingkungan dan ekonomi - beroperasi di berbagai sektor. Ini termasuk aktor seperti FAM Organic, Komodo Water, Mycotech, Neurafarm, Perfect Fit, PT Seaweed Tama Biopac Indonesia, Rahsa Nusantara, Sampangan, Sefactor Deos Maks, dan SukkhaCitta, antara lain.



Masyarakat sipil dan gerakan seperti kampanye #BanggaBuatanIndonesia, yang mempromosikan konsumsi produk buatan lokal. Masyarakat sipil yang secara aktif mempromosikan pengadaan berkelanjutan dan pemberdayaan UMKM sebagai aktor utama ekonomi berkelanjutan termasuk KEHATI dan AMAN, antara lain.



Aktor Internasional - terlibat dalam mendukung dalam pengembangan kebijakan dan program keberlanjutan juga dapat memainkan peran sebagai penasehat dalam jalur kebijakan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Mereka juga memainkan peran penting dalam menghubungkan tiga komponen utama dalam ekosistem - pengadaan barang dan jasa, UMKM, dan keberlanjutan. Aktor Internasional yang mendukung kebijakan berkelanjutan seperti GIZ, SWITCH ASIA GREEN (EU), Progam Page, British Council dan lainnya.



Photo: unsplash.com

LANGKAH SELANJUTNYA: LAB KEBIJAKAN UNTUK PENGADAAN BERKELANJUTAN

The Policy Labs for Sustainable Procurement proses diselenggarakan di Indonesia oleh Bappenas, LTKL, SEED dan Intellar. Program ini akan menghubungkan diskusi tentang pembangunan berkelanjutan, tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengakses pasar pengadaan, dan kegiatan pengadaan pemerintah kabupaten, dalam upaya memanfaatkan peluang untuk membeli produk dan layanan cerdas iklim buatan lokal. Setelah lokakarya tentang mengidentifikasi bidang prioritas untuk tindakan dan hambatan yang dihadapi UMKM, program ini akan menyajikan pernyataan tantangan sebagai bagian dari Forum Pembangunan Indonesia untuk memacu tindakan di bidang ini. Program ini akan diakhiri dengan hackathon yang dirancang untuk menyatukan kolaborasi lintas sektor untuk merancang jalur ke depan dalam memastikan pasar pengadaan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh UMKM berkelanjutan berbasis lokal.

PLSP menargetkan pemerintah kabupaten yang memiliki komitmen kuat pada produksi komoditas berkelanjutan seperti anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL/Asosiasi Kabupaten Lestari). Pemerintah kabupaten dipandang sebagai pemeran kunci untuk mendorong proses kolaboratif antara instansi yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan produksi komoditas dan pemangku kepentingan utama di kabupaten. Melalui pendekatan partisipatif yang akan melibatkan UMKM dalam proses integrasi kebijakan dan program, hal ini juga dapat menjadi arah untuk mempercepat lahirnya UU Kewirausahaan untuk memberikan landasan regulasi bagi kegiatan kewirausahaan sosial di Indonesia. Keterlibatan pemerintah pusat akan mendukung pengidentifikasian faktor-faktor pendukung dan penghalang peraturan yang ada dan potensial, dan memfasilitasi diskusi dan pertukaran informasi antara semua pemangku kepentingan untuk menghasilkan perubahan peraturan yang diusulkan. Arah ini akan memperkuat peran UMKM dalam mengurangi ketimpangan, mendukung pengembangan ekonomi lokal, dan menjaga lingkungan.

Referensi

- Angel Investor Network. (2016). Social Finance and Social Enterprises. <https://www1.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/INS-SF%20Report%20ANGIN.PDF>.
- Asian Development Bank (2021). Climate Risk Country Profile Indonesia. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/700411/climate-risk-country-profile-indonesia.pdf>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). Strengthening MSMEs as Drivers of National Economic Recovery. <https://www3.investindonesia.go.id/en/why-invest/indonesia-economic-update/strengthening-msmes-as-drivers-of-national-economic-recovery>
- Boston Consulting Group. (2015). The Art of Sustainable Giving: Priorities to Accelerate Social Enterprise Growth in Indonesia. https://image-src.bcg.com/The-Art-of-Sustainable-Giving-May-2015_tcm93-40480.pdf
- British Council. (2018). The State of Social Enterprise in Indonesia. https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/the_state_of_social_enterprise_in_indonesia_british_council_web_final_0.pdf
- Diffenbaugh, N., & Burke, M. (2019). Global warming has increased global economic inequality. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116, 201816020. <https://doi.org/10.1073/pnas.1816020116>
- Haryanti, D., & Hidayat, I. (2018). Portrait of Indonesian MSMEs: Little Ones Who Play a Big Role | Indonesian SMEs. <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>
- International Labour Organization. (2019). Financing Small Business in Indonesia. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/ro-bangkok/ilo-jakarta/documents/publication/wcms_695134.pdf
- IPCC. (2018). Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1.5oC approved by governments. www.ipcc.ch
- LTKL. (2020). Mapping Commitment of Subnational Government to Sustainable Land Use in Southeast Asia. https://jaresourcehub.org/wp-content/uploads/2021/02/Buku_LTKL-TFA-Report_Final.pdf
- Maritz, Alex, Aron Perenyi, Gerrit de Waal and Christoph Buck. (2020). Sustainability 12(11). Entrepreneurship as the Unsung Hero during the Covid-19 Economic Crisis. <https://doi.org/10.3390/su12114612>
- Nugraheni, Ninis, Hening Prabawa Arifanda, Alifihan Astaftiyan. (2020). Public Procurement Contract for Goods and Services Following the Presidential Decree Number 12 of 2020 on the Stipulation of the Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic as a National Disaster. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a5>
- OECD. (2018). SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264306264-en>
- OECD. (2019). Green Growth Policy Review Indonesia. <https://www.oecd.org/indonesia/green-growth-policy-review-indonesia.htm>
- OECD. (2019). Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth. OECD. <https://doi.org/10.1787/c19b6f97-en>
- PAGE. (2018). Indonesia PAGE Partner Country. <https://www.un-page.org/Indonesia%20country>
- Purwanto, N. P. (2020). Fiscal assistance for MSMEs in the Covid-19 Pandemic Period.
- Suryani E, Hendrawan R. A., Rahmawati U. E., Cahyandini G. A. , M. A. S. Mahardhika and R. Riski, „Model Scenario to Increase Market Share and Profitability of MSMEs through Business Process Digitization,“ (2020) 6th Information Technology International Seminar (ITIS), 2020, pp. 7-12, doi: 10.1109/ITIS50118.2020.9321047.
- The Economist Intelligence Unit. (2020). The future of public spending. https://content.unops.org/publications/Thefutureofpublicspending_EN.pdf?mtime=20200623084321&focal=none
- UNDP and University of Indonesia. (2020). Impact of Covid-19 Pandemic on MSMEs in Indonesia. <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2021/docs/INS-Report%20Impact%20of%20COVID-19%20Pandemic%20on%20MSMEs%20in%20Indonesia.pdf>
- UNFCCC. (2016). First Nationally Determined Contribution Indonesia. https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf
- UNFCCC. (2020). Indonesia Second Biennial Update Report. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FSV_Climate%20Dialogues%202020_Indonesia.pdf
- Wibowo, Phillia. (2020). McKinsey: Micro, Small and Medium Enterprises Can Contribute \$140B to Indoensia's GDP by 2030. <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/mckinsey-micro-small-medium-enterprises-can-contribute-140b-to-indonesia-s-gdp-by-2030/item9337>
- World Bank. (2020). Global Public Procurement Database: Share, Compare, Improve! <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/03/23/global-public-procurement-database-share-compare-improve>



www.seed.uno